

ISBN 979.474.016.9
31533.9005



PENDAPATAN REGIONAL
JAKARTA BARAT
1986 - 1988

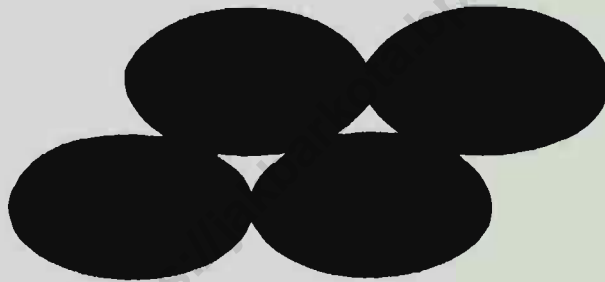


Jakarta



ISBN 979.474.016.0
31533.9005.

PENDAPATAN REGIONAL JAKARTA BARAT 1986 - 1988



NO. PUSTAKA :	10.0390.0013.
M F N :	105
MILIK :	PERPUSTAKAAN BPS PROVINSI DKI JAKARTA

WILDA:

AR SIP

KATA PENGANTAR

Penerbitan Pendapatan Regional di 5 (lima) Wilayah Kota D.K.I. Jakarta tahun 1983-1988 merupakan kelanjutan penerbitan sebelumnya yaitu seri tahun 1983-1985. Pada penerbitan ini telah banyak disempurnakan dalam metode penghitungan serta kelengkapan datanya, sehingga angka yang dihasilkan untuk seri tahun 1983-1985 merupakan angka perbaikan.

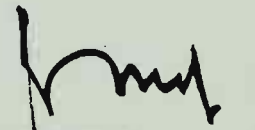
Harapan kami penerbitan hasil penghitungan ini bisa membantu perencanaan dalam bidang ekonomi di tingkat Wilayah Kota dalam hubungannya dengan perencanaan perekonomian D.K.I. Jakarta.

Kami sadari bahwa dalam penerbitan ini sudah tentu masih ada kekurangan-kekurangan yang akan selalu kami usahakan perbaikannya.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu sampai terlaksananya penerbitan ini kami menyampaikan penghargaan serta terima kasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, Maret 1990

KANTOR STATISTIK PROVINSI
D.K.I. JAKARTA


SUKMADI, M.SC
Nip.340000685

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
KONSEP DAN DEFINISI	1
I. U m u m	1
II. Arti dan Kegunaan Statistik Pendapatan Regional	1
2.1 Arti dan Kegunaan	1
2.2 Siklus Kegiatan Ekonomi	2
2.3 Pengertian pendapatan Regional	3
III. Metode Penghitungan Pendapatan Regional	5
3.1 Pendekatan Produksi (Production Approach)	5
3.2 Pendekatan Pendapatan (Income Approach) ...	6
3.3 Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach)	6
3.4 Metode Alokasi (Allocation Approach)	7
IV. MASALAH YANG DIHADAPI	7
V. PENGHITUNGAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN	9
5.1 Revaluasi	10
5.2 Ekstrapolasi	10
5.3 Deflasi	10
5.4 Deflasi Berganda	10

Halaman

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO JAKARTA BARAT	11
I. U m u m	11
II. Struktur Perekonomian Jakarta Barat	11
III. Pengembangan Secara Sektoral	13
IV. Perkembangan PDRB per Kapita	13
V. Peranan PDRB Jakarta Barat Terhadap PDRB D.K.I Jakarta	14

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		Halaman
TABEL 1.	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO WILAYAH JAKARTA BARAT ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA, 1983-1988 (JUTAAN RUPIAH)	16
TABEL 2.	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO WILAYAH JAKARTA BARAT ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1983 MENURUT LAPANGAN USAHA, 1983-1988 (JUTAAN RUPIAH)	18
TABEL 3.	DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO WILAYAH JAKARTA BARAT ATAS DASAR HARGA BERLAKU, MENURUT LAPANGAN USAHA 1983-1988 (%)	20
TABEL 4.	DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO WILAYAH JAKARTA BARAT ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1983, MENURUT LAPANGAN USAHA, 1983-1988 (%)	22
TABEL 5.	INDEKS PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO WILAYAH JAKARTA BARAT ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA, 1983-1988 (1983=100,00)	24
TABEL 6.	INDEKS PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO WILAYAH JAKARTA BARAT ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1983, MENURUT LAPANGAN USAHA, 1983-1988, (1983=100,00)	26
TABEL 7.	INDEKS BERANTAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO WILAYAH JAKARTA BARAT, ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA, 1983-1988, (TAHUN SEBELUMNYA=100,00)	28
TABEL 8.	INDEKS BERANTAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO WILAYAH JAKARTA BARAT, ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1983 MENURUT LAPANGAN USAHA, 1983-1988, (TAHUN SEBELUMNYA=100,00)	30
TABEL 9.	INDEKS IMPLISIT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO WILAYAH JAKARTA BARAT MENURUT LAPANGAN USAHA, 1983-1988, (1983=100,00)	32

TABEL 10. KONTRIBUSI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO WILAYAH JAKARTA BARAT ATAS DASAR HARGA BERLAKU, MENURUT LAPANGAN USAHA, 1983-1988 (%)	34
TABEL 11. KONTRIBUSI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO WILAYAH JAKARTA BARAT ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1983, MENURUT LAPANGAN USAHA, 1983-1988 (%)	36
TABEL 12. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO WILAYAH JAKARTA BARAT DAN ANGKA-ANGKA PER KAPITA, TAHUN 1983-1988	38

<https://jakbarkota.bps.go.id>

KONSEP DAN DEFINISI

I. U M U M

Pada hakekatnya yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, mengarahkan pembagian pendapatan masyarakat yang semakin merata, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan usaha menggeser kegiatan dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Dalam membuat perencanaan pembangunan dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, tentunya diperlukan berbagai macam data statistik; dan salah satu indikator ekonomi yang penting untuk membuat perencanaan dan evaluasi tadi adalah statistik pendapatan nasional atau untuk tingkat daerah disebut statistik pendapatan regional.

Kalau Pendapatan Nasional Indonesia sudah dihitung sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda dan sampai kini setiap tahun secara teratur dihitung oleh Biro Pusat Statistik; maka untuk Pendapatan Regional Provinsi baru dimulai penghitungannya tahun 1969 pertama kali oleh pemerintah D.K.I. Jakarta melalui Kantor Statistiknya. Sampai kini sudah seluruh provinsi melakukan penghitungan pendapatan regionalnya, bahkan beberapa provinsi sudah menghitung ke tingkat kabupaten/kotamadya.

II. ARTI DAN KEGUNAAN STATISTIK PENDAPATAN REGIONAL

2.1 Arti dan Kegunaan

Perencanaan ekonomi, umumnya mempermasalahkan dua hal pokok yaitu:

- a. Bagaimana mengusahakan agar pembangunan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara mantap, dan;
- b. Bagaimana mengarahkan agar pendapatan yang timbul tersebut dapat diterima secara adil dan merata.

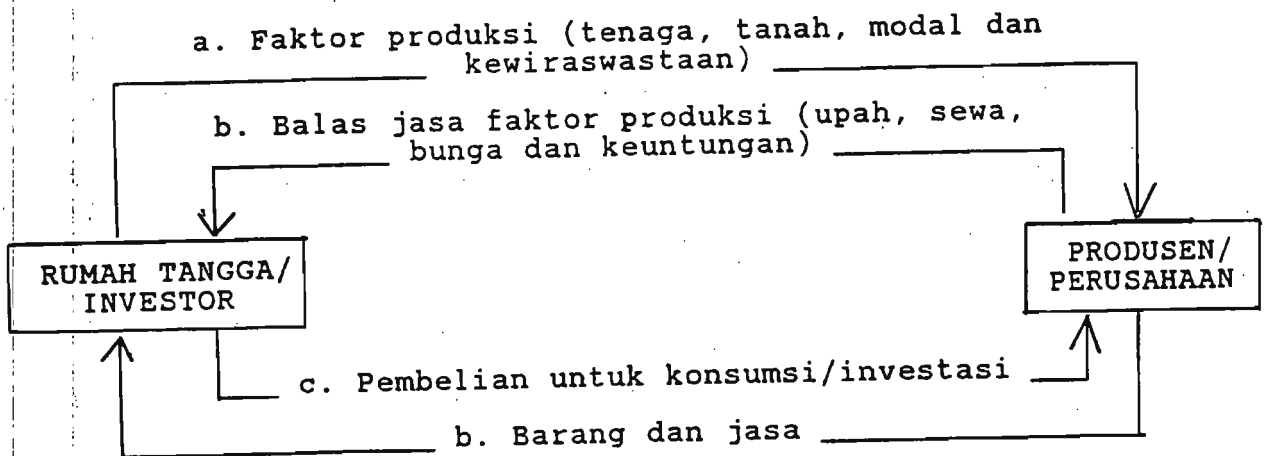
Untuk menjawab pertanyaan itu secara kuantitatif, maka statistik pendapatan regional dapat dipakai sebagai salah satu ukuran dan landasan yang tepat dalam perencanaan ekonomi tersebut. Statistik Pendapatan Regional ialah suatu sistem data kuantitatif yang menggambarkan besarnya pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan ekonomi (rumah tangga/individu, perusahaan, pemerintah) pada tingkat regional.

Manfaat statistik pendapatan regional antara lain:

- a. Mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi regional baik secara menyeluruh maupun sektoral;
- b. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu daerah, baik tingkat pertumbuhannya maupun tingkat kemakmurannya dibandingkan daerah lain;
- c. Mengetahui tingkat inflasi dan deflasi yang terjadi pada suatu daerah;
- d. Mengetahui gambaran struktur perekonomian daerah;
- e. Mengetahui potensi suatu daerah terhadap nasional baik keseluruhan maupun sektoral.

2.2 Siklus Kegiatan Ekonomi

Transaksi ekonomi yang dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat, pada dasarnya terdiri dari kelompok yang memproduksi barang dan jasa dan kelompok yang mengkonsumsi dan menginvestir barang dan jasa tadi. Kelompok produsen dalam menghasilkan barang dan jasa menggunakan faktor produksi (tenaga kerja, tanah, modal, kewiraswastaan) yang berasal dari konsumen, sedangkan konsumen membeli barang dan jasa yang dihasilkan produsen untuk memenuhi kebutuhannya. Transaksi siklus kegiatan sebagai berikut:



2.3 Pengertian Pendapatan Regional

Sebelum sampai kepada pengertian sesungguhnya dari pendapatan regional, sebaiknya perlu dijelaskan secara sistimatis agregat-agregat dari pendapatan regional sebagai berikut:

a. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar

Adalah nilai bersih (produk) barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam satu periode tertentu. Nilai bersih tersebut sebenarnya adalah balas jasa dari faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi yang terdiri dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, keuntungan serta ditambah dengan penyusutan & pajak tidak langsung neto. Balas jasa faktor produksi, penyusutan dan pajak tidak langsung neto tadi dalam pengertian sektoral disebut sebagai nilai tambah bruto; sehingga PDRB atas dasar harga pasar tersebut juga merupakan penjumlahan nilai tambah bruto dari seluruh sektor kegiatan ekonomi.

Ditinjau dari segi penggunaan barang dan jasa, PDRB atas dasar harga pasar ini juga merupakan penjumlahan dari pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi

pemerintah, pembentukan modal, perubahan stok dan ekspor neto (ekspor-impor). Pengertian mengenai PDRB ini lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 1.

b. Produk Domestik Regional Neto Atas Dasar Harga Pasar

Perbedaan konsep neto di sini dan konsep bruto pada (a) adalah karena faktor penyusutan. Dalam PDRN atas dasar harga pasar, komponen penyusutan telah dikeluarkan.

c. Produk Domestik Regional Neto Atas Dasar Biaya Faktor

Perbedaan konsep biaya faktor di sini dan konsep harga pasar pada (b) adalah karena faktor pajak tidak langsung neto. Dalam PDRN atas dasar biaya faktor, komponen pajak tidak langsung neto telah dikeluarkan. Pajak tidak langsung neto adalah pajak tidak langsung dikurangi dengan subsidi.

d. Produk Regional Neto Atas Dasar Biaya Faktor

Perbedaannya dengan konsep (c) di atas adalah masalah domestiknya. Disebut Produk Domestik Regional karena nilai tambah yang dihitung adalah seluruh nilai tambah yang timbul dari berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah tanpa memperhatikan pemilikan atas faktor produksinya, apakah milik penduduk wilayah tersebut ataukah milik penduduk wilayah lain. Sedangkan pada (d) yaitu produk regional yang diperhitungkan adalah nilai tambah dari faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk wilayah tersebut, baik beroperasi dalam wilayah bersangkutan maupun beroperasi di luar wilayah. Oleh karena itu untuk sampai kepada Produk Regional ini, pendapatan atas faktor produksi milik penduduk wilayah lain harus dikeluarkan dan sebaliknya harus dimasukkan pendapatan atas faktor produksi milik penduduk wilayah tersebut yang berasal dari

luar wilayah; yang selisihnya selanjutnya disebut sebagai faktor pendapatan neto dari luar wilayah. Jadi Produk Regional Neto Atas Dasar Biaya Faktor (Pendapatan Regional) merupakan Produk Domestik Regional Neto ditambah faktor pendapatan neto dari luar wilayah. Pengertian inilah yang sebenarnya merupakan pendapatan regional.

e. Pendapatan orang seorang (Personal Income)

Merupakan Pendapatan Regional dikurang pajak pendapatan perusahaan, keuntungan yang tidak dibagikan, iuran kesejahteraan sosial ditambah transfer ke rumah tangga dan bunga neto atas hutang pemerintah.

f. Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income)

Merupakan pendapatan orang-seorang dikurang pajak rumah tangga dan transfer yang dibayar oleh rumah tangga.

Selanjutnya susunan agregat pendapatan regional yang dijelaskan di atas, dapat dilihat pada Lampiran 2.

III. METODE PENGHITUNGAN PENDAPATAN REGIONAL

Penghitungan pendapatan regional atau untuk masing-masing sektor merupakan penghitungan nilai tambah bruto, dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan (approach) tergantung kepada data yang tersedia, dan dari segi mana pendapatan regional itu akan dilihat.

Pendekatan penghitungan tersebut adalah:

3.1 Pendekatan Produksi (Production Approach)

Penghitungan nilai tambah dengan pendekatan ini diperoleh dari nilai produksi (output) dikurangi biaya

antara. Output merupakan nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan produksi dalam satu periode tertentu, sedangkan biaya antara adalah barang dan jasa yang digunakan dalam proses kegiatan produksi yang sedang berjalan dimana barang-barang tersebut merupakan barang-barang tahan lama yang biasanya habis dalam sekali pakai atau mempunyai umur penggunaan kurang dari satu tahun. Pengeluaran atas balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, keuntungan serta penyusutan dan pajak tidak langsung neto bukan merupakan biaya antara. Demikian juga pengeluaran untuk pembelian/pembuatan barang-barang modal perusahaan bukan merupakan biaya antara.

3.2 Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Penghitungan nilai tambah dengan pendekatan ini diperoleh dari penjumlahan komponen-komponen nilai tambah itu sendiri. Seperti telah dijelaskan nilai tambah bruto merupakan penjumlahan dari balas jasa faktor produksi yang komponennya terdiri dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, keuntungan ditambah dengan penyusutan dan pajak tidak langsung neto.

3.3 Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

Penghitungan melalui pendekatan ini dilakukan langsung terhadap pendapatan regional, tidak sektor demi sektor yaitu dengan menjumlahkan pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok dan ekspor neto (ekspor-impor). Kalau data yang digunakan untuk penghitungan pendapatan regional dengan ketiga pendekatan ini cukup konsisten, maka hasil estimasinya tentu tidak akan jauh berbeda. Selain ketiga pendekatan di atas, masih ada satu metode lagi yang kadang-kadang digunakan, terutama kalau ada tidak tersedia data samasekali yaitu metode alokasi.

3.4 Metode Alokasi (Allocation Approach)

Penghitungan nilai tambah dengan metode ini diperoleh dengan mengalokasikan nilai tambah nasional untuk provinsi tersebut, berdasarkan suatu indikator sebagai alokatornya.

Misalnya: Nilai tambah angkutan udara nasional dialokasikan berdasarkan jumlah penumpang berangkat dari provinsi tersebut terhadap jumlah penumpang berangkat nasional.

IV. MASALAH DAN KETERBATASAN

Yang menjadi masalah pokok dalam penghitungan pendapatan regional adalah bagaimana memperkirakan secara tepat pendapatan suatu daerah/regional, agar hasil penghitungan tersebut dapat mencerminkan keadaan perekonomian yang sebenarnya, sehingga dapat digunakan oleh para pembuat keputusan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan kebijaksanaan pembangunan perekonomian baik di tingkat regional maupun nasional.

Didalam penghitungan pendapatan regional beberapa masalah yang sering dihadapi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dari hasil sensus atau catatan administrasi berbagai instansi seringkali data yang tersedia untuk suatu lingkup wilayah tidak sama dengan wilayah administrasi, sehingga pemecahan menurut wilayah/regional menjadi sukar atau terbentur kepada masalah teknis penyajian/kerahasiaan data.

Contoh:

- a. Wilayah eksploitasi PLN biasanya tidak memperhatikan batas wilayah administrasi sehingga pemecahan menurut wilayah administrasi cukup sukar.

- b. Di dalam suatu provinsi misalnya hanya terdapat tiga perusahaan elektronika yang terletak di dua wilayah kota. Penyajian data menurut wilayah kota ini menjadi kurang dapat dibenarkan karena data salah satu perusahaan akan mudah sekali terlihat sehingga tidak ada kerahasiaannya lagi.
2. Untuk suatu perusahaan yang bersifat multi regional, sistem pembukuan perusahaan biasanya dilakukan secara sentral sehingga sukar untuk diperhitungkan secara regional. Misalnya, Perusahaan Penerbangan, Palyaran dan sebagainya.
 3. Hasil suatu sampel survei atau proyeksi, yang direncanakan dan dimaksudkan untuk digunakan secara nasional, akan menjadi kurang tepat bila dirinci menurut daerah karena rencana samplingnya belum tentu ditujukan untuk memenuhi kepentingan daerah, misalnya: Susenas.
 4. Masalah lalu lintas perdagangan antar daerah lebih sukar diteliti dibandingkan dengan lalu lintas perdagangan antar negara. Di dalam lingkup regional ekspor dan impor akan mencakup lalu lintas perdagangan melalui darat, antar pulau dan luar negeri. Sedangkan pada lingkup nasional hanya mencakup perdagangan dengan luar negeri saja.
 5. Sehubungan dengan data yang digunakan sering tidak lengkap, maka timbul kesukaran-kesukaran di dalam melakukan penghitungan pendapatan regional, akibatnya tidak jarang data nasional dipinjam di dalam penghitungan pendapatan regional tersebut. Hal ini membuat hasil penghitungan pendapatan regional kurang menggambarkan kondisi perekonomian yang sebenarnya.
 6. Lebih-lebih lagi untuk penghitungan PDRB menurut wilayah kota di D.K.I. Jakarta, timbul masalah lain seperti

mobilitas penduduk yang cukup tinggi antar wilayah, kegiatan produksi dan distribusi yang sulit dibedakan antara wilayah serta sangat minimnya data sosial ekonomi yang menggambarkan secara terinci dan jelas menurut wilayah kota tersebut.

Meskipun penghitungan pendapatan regional di tingkat provinsi dan kabupaten/kotamadya, banyak menemui hambatan terutama dari segi tersedianya data, namun usaha-usaha untuk tetap dapat menyajikan angka-angka pendapatan regional ini serta penyempurnaannya akan terus dilakukan. Namun demikian, perlu kiranya menjadi bahan pertimbangan bahwa semakin rendah unit wilayah yang akan dihitung (kabupaten, wilayah kota, kecamatan) akan semakin langka dan sulit data yang tersedia. Disamping itu keadaan perwilayahan yang semakin terbuka, menyulitkan pengumpulan datanya.

V. PENGHITUNGAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN

Pendapatan regional yang dihitung secara series, dapat disajikan dalam dua bentuk yaitu:

- a. Atas dasar harga yang berlaku, dimana baik produksi maupun biaya-biaya setiap tahun dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahun tersebut.
- b. Atas dasar harga konstan suatu tahun dasar, dimana baik produksi maupun biaya-biaya setiap tahun dinilai atas dasar harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Penyajian nilai tambah (produk domestik regional bruto) atas dasar harga konstan ini penting terutama untuk mengetahui laju pertumbuhan riil dari perekonomian suatu wilayah. Nilai tambah atas dasar harga konstan, dapat dihitung dengan beberapa cara tergantung pada data yang tersedia pada masing-masing sektor.

5.1 Revaluasi

Dengan cara ini, baik produksi maupun biaya-biaya yang dipakai pada masing-masing tahun, dinilai dengan harga pada tahun dasar. dengan demikian produksi atas dasar harga konstan dikurangi biaya antara atas dasar harga konstan akan diperoleh nilai tambah juga atas dasar harga konstan.

5.2 Ekstrapolasi

Nilai tambah atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggerakkan nilai tambah pada tahun dasar berdasarkan indeks produksi. Kalau indeks produksi tidak tersedia, bisa dipakai indeks lainnya yang menggambarkan produktivitas seperti indeks tenaga kerja, indeks jumlah penumpang dan sebagainya.

5.3 Deflasi

Nilai tambah atas dasar harga konstan, diperoleh dengan membagi/men-deflate nilai tambah atas dasar harga yang berlaku masing-masing tahun berdasarkan indeks harga dari barang-barang yang bersangkutan. Kalau indeks harga tersebut tidak tersedia, bisa dipakai indeks lainnya seperti indeks harga perdagangan besar, indeks harga konsumen, indeks biaya hidup, dan sebagainya.

5.4 Deflasi Berganda

Disebut berganda karena deflasi dilakukan dua kali, yaitu:

- a. Nilai produksi atas dasar harga yang berlaku di-deflate tersendiri berdasarkan indeks harga produksi.
- b. Biaya antara atas dasar harga yang berlaku juga di-deflate tersendiri berdasarkan indeks harga biaya antara tersebut.

Selisih antara dua hasil deflasi ini, tentunya merupakan nilai tambah atas dasar harga konstan.

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO JAKARTA BARAT

I. U M U M

Kedudukan D.K.I. Jakarta sebagai ibukota provinsi dan ibukota negara tidak langsung maupun langsung dipengaruhi perkembangan perekonomian internasional dan nasional, sampai saat ini disinyalir sebagian uang yang beredar berada di D.K.I. Jakarta. Keadaan ini dapat dipantau dari aktivitas perbankan, perdagangan serta aktivitas lainnya. Hal ini dimungkinkan pula karena arus informasi dan perkembangan masih terpusat di D.K.I. Jakarta.

Sebagai saling keterkaitan itu semua, D.K.I. Jakarta harus memacu diri guna mengimbangi tingkat pertumbuhan kebutuhan yang sangat pesat, untuk itu seluruh upaya dan kekuatan semaksimalnya sehingga mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat menopang pertumbuhan kebutuhan penduduk kota.

Dilihat secara umum selain tahun 1983-1988 kenaikan rata-rata perekonomian Jakarta Barat sebesar 7,10 persen, agak di atas kenaikan perekonomian D.K.I. Jakarta pada kurun waktu yang sama (sebesar 6,88 persen).

Bila dilihat setiap kenaikan yang terjadi pada tahun 1983 sebesar 7,67 persen menjadi 2,10 persen. Penurunan yang cukup besar ini disebabkan karena tahun 1988 penurunan di sektor bank dan pertanian merupakan sektor utama di dalam pembentukan nilai tambah D.K.I. Jakarta.

I. STRUKTUR PEREKONOMIAN WILAYAH JAKARTA BARAT

Dalam mengukur naik turunnya laju pertumbuhan ekonomi satu daerah dapat digunakan laju pertumbuhan PDRBnya, ini

didapatkan dengan menghitung nilai produksi barang dan jasa yang ada di satu daerah dilakukan dengan tingkat harga, sehingga menghasilkan output, yang bisa dirinci dalam bentuk harga konstan dan harga yang berlaku. Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, para ekonom berpendapat bahwa laju pertumbuhan PDRB riilnya harus di atas laju pertumbuhan penduduk.

Seperti telah disinggung dalam uraian sebelumnya bahwa untuk wilayah Jakarta Barat sektor perdagangan masih merupakan "primadona" dalam PDRB yang kemudian diikuti sektor industri pengolahan dan perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Potensi ini dapat dilihat distribusi persentase PDRB dari tahun 1983 sampai dengan 1988 telah terjadi pergeseran satu sama lain. Dari hasil penghitungan pada Tabel 4 terlihat, bahwa sektor perdagangan tahun 1988 sebesar 31,85 persen masih merupakan sektor yang dominan. Nilai ketiga sektor ini (perdagangan, industri dan angkutan) hampir 60,00 persen dari nilai seluruh PDRBnya. Besarnya persentase ini dari tahun ke tahun cenderung naik terus seperti pada tahun 1986 tercatat 61,42 persen dan tahun 1988 turun sedikit menjadi 60,33 persen. Dengan uraian ini dapat diperkirakan pula pada masa-masa mendatang peranan ketiga sektor ini akan dominan atau akan lebih besar lagi peranannya, keadaan ini sejalan dengan RUTR-2005 Jakarta Barat.

Walaupun demikian sektor lain tidak berarti tidak ada kontribusi terhadap pembentukan PDRB wilayah lain, akan tetapi peranannya cenderung turun terus dari tahun 1983 ke tahun 1988. Hal ini terlihat pada sektor pertanian yang lahannya memang semakin menyempit setelah berubah menjadi lokasi perumahan dan industri. Sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya juga mengalami penurunan, hal ini disinyalir dengan telah dimulainya kegiatan perdagangan di jalan Mangga Dua, Jakarta Utara.

III. PERKEMBANGAN SECARA SEKTORAL

Bila dilihat secara sektoral, maka akan terlihat bahwa sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya yaitu tahun 1984 sebesar 295,02 persen dalam kurun waktu terus menurun, dimana pada tahun 1986 anjlok menjadi 60,24 persen. Walaupun demikian sektor ini tetap merupakan sektor yang rata-rata dalam kurun 5 tahun perkembangannya cukup baik. Sektor lain yang perkembangannya cukup tinggi dalam kurun waktu 5 tahun yaitu sektor industri pengolahan 15,08 persen, sektor listrik, gas & air minum sebesar 12,33 persen, sedangkan sektor pertanian yang perkembangannya paling rendah yaitu 1,37 persen. Hal ini dapat dimaklumi karena lahan untuk sektor ini kian menciut.

IV. PERKEMBANGAN PDRB PER KAPITA

PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara PDRB wilayah dengan jumlah penduduk, angka ini menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan yang sekaligus juga menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat/penduduk, walaupun ukuran ini belum bisa disebut sebagai produk per kapita.

Dari tabel 12 terlihat bahwa besarnya PDRB per kapita setiap tahunnya terus meningkat, namun kenaikan itu besarnya bervariasi sesuai dengan tingkat pencapaian PDRB dalam kurun waktu yang bersamaan.

Dalam tahun 1983 besarnya PDRB per kapita Jakarta Barat baru mencapai 857.646,- rupiah, tahun 1986 sebesar 1.157.808,- rupiah dan tahun 1988 naik menjadi 1.411.643,- rupiah bila dilihat dari harga yang berlaku. Bila dilihat dari harga konstan 1983, dimana ukuran ini dianggap cukup baik karena telah dieliminirnya faktor inflasi, maka terlihat pada tahun 1984 besarnya PDRB per kapita 892.366,- juta

rupiah, tahun 1986 besarnya 933.576,- rupiah dan tahun 1988 sebesar 963.243,- rupiah.

Uraian data di atas menunjukkan bahwa kenaikan PDRB per kapita menurut harga konstan 1983-1984 dalam indeks perkembangannya tercatat 4,89 persen dan tahun 1983-1988 terdapat kenaikan sebesar 28,32 persen. Kenaikan ini cukup berarti dalam peningkatan pendapatan masyarakat, hal ini ditunjang adanya kenaikan PDRB wilayah Jakarta Barat tahun 1983-1984, 41,83 persen dan tahun 1983-1988 sebesar 68,68 persen (lihat Tabel 5). Kenaikan ini jauh di atas kenaikan jumlah penduduk yang berkisar 3 persen di antara tahun 1983-1984 dan tahun 1983-1988 kenaikan penduduk sekitar 4,49 persen.

V. PERANAN PDRB JAKARTA BARAT TERHADAP PDRB D.K.I. JAKARTA

Dalam penghitungan PDRB provinsi D.K.I. Jakarta dikatakan dengan menghitung seluruh potensi ekonomi yang ada di lima wilayah kota D.K.I. Jakarta. Potensi ekonomi antar kelima wilayah tadi sama, ini banyak dipengaruhi oleh struktur dan kondisi lingkungan serta faktor pendukung yang merupakan ciri-ciri wilayah atau spesifikasi yang dimiliki masing-masing wilayah. Namun demikian cerminan keadaan perekonomian di D.K.I. Jakarta mempunyai mobilitas tenaga kerja serta peranan perusahaan telah berkembang secara alami telah demikian tinggi, sehingga kadang-kadang menimbulkan situasi yang beraneka pula. Kondisi seperti ini dapat dilihat kontribusi dari wilayah Jakarta Barat terhadap PDRB D.K.I. Jakarta yang dihitung berdasarkan harga berlaku.

Tabel 10 menunjukkan bahwa kontribusi wilayah Jakarta Barat dalam kurun waktu 5 tahun (1983-1988) agak bervariasi, dimana tahun 1983 kontribusi Jakarta Barat terhadap PDRB D.K.I. Jakarta sebesar 15,86 persen, tahun 1984 sebesar 18,30

persen, tahun 1986 turun menjadi 16,45 persen dan tahun 1988 turun lagi menjadi 15,76 persen.

Lebih jauh kalau dilihat dari sektor/lapangan usahanya tahun 1988, sektor pertanian masih memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB D.K.I. Jakarta sebesar 32,29 persen, kemudian disusul oleh sektor perdagangan sebesar 22,52 persen, dan sektor sewa rumah sebesar 18,66 persen. Di antara sepuluh sektor usaha, sektor industri pengolahan yang paling rendah sumbangannya terhadap PDRB D.K.I. Jakarta tahun 1988 sebesar 11,02 persen.

<https://jakbarkota.bps.go.id>

TABEL 1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO WILAYAH JAKARTA BARAT ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA, 1983-1988 (JUTAAN RUPIAH)

LAPANGAN USAHA	1983	1984	1985
1. PERTANIAN	46.987	50.310	44.740
a. Tanaman Bahan Makanan	13.037	13.157	6.708
b. Tanaman Lainnya	977	1.777	1.801
c. Peternakan & Hasil-hasilnya	32.911	35.237	36.139
d. Perikanan	62	139	92
2. INDUSTRI PENGOLAHAN	128.185	177.005	214.844
3. LISTRIK, GAS & AIR MINUM	48.343	59.211	68.325
a. Listrik	46.741	55.987	65.113
b. Gas & Air Minum	1.602	3.224	3.212
4. BANGUNAN	84.421	94.840	104.017
5. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	448.314	509.461	559.199
a. Perdagangan Besar	407.901	463.283	511.793
b. Hotel	6.307	6.725	7.992
c. Restoran	34.106	39.453	39.414
6. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	116.098	134.433	148.904
a. Angkutan Kereta Api	3.939	4.925	4.398
b. Angkutan Jalan Raya	50.970	61.902	64.024
c. Angkutan Laut	-	-	-
d. Angkutan Udara	-	-	-
e. Jasa Penunjang Angkutan	31.936	34.631	36.532
f. Komunikasi	29.253	32.975	43.950
7. PERBANKAN & LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA	138.555	470.675	528.872
a. Perbankan	94.876	409.681	470.450
b. Asuransi & Lembaga keuangan lainnya	43.679	60.994	58.422
8. SEWARUMAH	55.266	59.699	63.957
9. PEMERINTAHAN & PERTAHANAN	79.859	90.493	110.958
10. JASA - JASA	94.068	112.676	127.711
a. Jasa Perusahaan	24.327	31.692	36.414
b. Jasa Sosial & Kemasyarakatan	23.652	29.834	34.789
c. Jasa Hiburan & Kebudayaan	19.856	19.938	21.714
d. Jasa Perorangan	26.233	31.212	34.794
J U M L A H	1.240.096	1.758.803	1.971.527

TABEL 1. (LANJUTAN)

LAPANGAN USAHA	1986	1987	1988
1. PERTANIAN	58.785	64.601	73.648
a. Tanaman Bahan Makanan	9.926	10.653	11.718
b. Tanaman Lainnya	2.161	2.932	3.404
c. Peternakan & Hasil-hasilnya	46.581	50.773	58.136
d. Perikanan	117	243	390
2. INDUSTRI PENGOLAHAN	245.590	302.939	398.788
3. LISTRIK, GAS & AIR MINUM	76.868	77.627	96.818
a. Listrik	73.513	73.601	89.668
b. Gas & Air Minum	3.355	4.026	7.150
4. BANGUNAN	113.743	131.802	160.053
5. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	610.529	678.328	798.822
a. Perdagangan Besar	557.624	616.943	727.573
b. Hotel	8.536	10.401	11.128
c. Restoran	44.369	50.984	60.121
6. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	170.946	209.688	232.817
a. Angkutan Kereta Api	4.755	5.084	5.514
b. Angkutan Jalan Raya	74.266	88.527	94.879
c. Angkutan Laut	-	-	-
d. Angkutan Udara	-	-	-
e. Jasa Penunjang Angkutan	42.618	45.843	50.607
f. Komunikasi	49.307	70.234	81.817
7. PERBANKAN & LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA	319.506	448.130	353.828
a. Perbankan	256.142	373.360	261.267
b. Asuransi & Lembaga keuangan lainnya	63.364	74.770	92.561
8. SEWA RUMAH	71.246	72.390	81.364
9. PEMERINTAHAN & PERTAHANAN	126.267	127.866	133.482
10. JASA - JASA	137.997	162.505	191.890
a. Jasa Perusahaan	39.115	49.385	61.595
b. Jasa Sosial & Kemasyarakatan	38.997	45.729	53.983
c. Jasa Hiburan & Kebudayaan	21.282	22.346	23.458
d. Jasa Perorangan	38.603	45.045	52.854
J U M L A H	1.931.477	2.275.876	2.521.510

TABEL 2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO WILAYAH JAKARTA BARAT ATAS DASAR
HARGA KONSTAN 1983 MENURUT LAPANGAN USAHA, 1983-1988
(JUTAAN RUPIAH)

LAPANGAN USAHA	1983	1984	1985
1. PERTANIAN	46.987	38.920	39.436
a. Tanaman Bahan Makanan	13.037	12.867	6.923
b. Tanaman Lainnya	977	1.437	1.633
c. Peternakan & Hasil-hasilnya	32.911	24.524	30.816
d. Perikanan	62	92	64
2. INDUSTRI PENGOLAHAN	128.185	136.585	174.966
3. LISTRIK, GAS & AIR MINUM	48.343	37.299	56.641
a. Listrik	46.741	35.886	55.307
b. Gas & Air Minum	1.602	1.413	1.334
4. BANGUNAN	84.421	70.577	91.139
5. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	448.314	375.855	459.269
a. Perdagangan Besar	407.901	341.816	419.370
b. Hotel	6.307	5.311	6.630
c. Restoran	34.106	28.728	33.269
6. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	116.098	100.571	119.250
a. Angkutan Kereta Api	3.939	2.733	2.509
b. Angkutan Jalan Raya	50.970	45.362	54.259
c. Angkutan Laut	-	-	-
d. Angkutan Udara	-	-	-
e. Jasa Penunjang Angkutan	31.936	28.175	34.242
f. Komunikasi	29.253	24.301	28.240
7. PERBANKAN & LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA	138.555	408.771	457.190
a. Perbankan	94.876	363.837	407.740
b. Asuransi & Lembaga keuangan lainnya	43.679	44.934	49.450
8. SEWARUMAH	55.266	47.848	58.598
9. PEMERINTAHAN & PERTAHANAN	79.859	67.075	84.199
10. JASA - JASA	94.068	77.834	99.542
a. Jasa Perusahaan	24.327	22.234	29.555
b. Jasa Sosial & Kemasyarakatan	23.652	18.404	25.090
c. Jasa Hiburan & Kebudayaan	19.856	14.428	17.264
d. Jasa Perorangan	26.233	22.768	27.633
J U M L A H	1.240.096	1.361.335	1.640.230

TABEL 2. (LANJUTAN)

LAPANGAN USAHA		1986	1987	1988
1.	P E R T A N I A N	46.682	50.372	48.348
	a. Tanaman Bahan Makanan	6.243	6.958	7.278
	b. Tanaman Lainnya	1.790	1.847	2.007
	c. Peternakan & Hasil-hasilnya	38.554	41.415	38.847
	d. Perikanan	95	152	216
2.	INDUSTRI PENGOLAHAN	199.960	214.399	255.633
3.	L I S T R I K, GAS & AIR MINUM	60.561	61.220	76.318
	a. L i s t r i k	59.117	59.513	72.883
	b. Gas & Air Minum	1.444	1.707	3.435
4.	B A N G U N A N	95.793	99.480	109.250
5.	PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	481.474	502.445	548.318
	a. Perdagangan Besar	439.074	457.870	501.774
	b. H o t e l	6.907	7.718	7.691
	c. Restoran	35.493	36.857	38.853
6.	PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	137.460	157.988	159.264
	a. Angkutan Kereta Api	2.628	2.705	2.930
	b. Angkutan Jalan Raya	70.209	74.473	77.543
	c. Angkutan Laut	-	-	-
	d. Angkutan Udara	-	-	-
	e. Jasa Penunjang Angkutan	28.979	40.815	33.120
	f. Komunikasi	35.644	39.995	45.671
7.	PERBANKAN & LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA	275.410	315.563	234.296
	a. Perbankan	220.812	262.929	173.025
	b. Asuransi & Lembaga keuangan lainnya	54.598	52.634	61.271
8.	S E W A R U M A H	62.142	65.775	68.534
9.	PEMERINTAHAN & PERTAHANAN	90.356	92.966	94.224
10.	J A S A - J A S A	107.571	116.700	126.381
	a. Jasa Perusahaan	33.091	37.182	40.859
	b. Jasa Sosial & Kemasyarakatan	28.136	33.143	37.776
	c. Jasa Hiburan & Kebudayaan	16.847	15.742	15.038
	d. Jasa Perorangan	29.497	30.633	32.708
J U M L A H		1.557.409	1.676.908	1.720.566

TABEL 3. DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO WILAYAH
 JAKARTA BARAT ATAS DASAR HARGA BERLAKU, MENURUT LAPANGAN USAHA
 1983-1988 (%)

LAPANGAN USAHA	1983	1984	1985
1. Pertanian	3,79	2,86	2,27
2. Industri Pengolahan	10,34	10,06	10,90
3. Listrik, Gas & Air Mimum	3,90	3,37	3,47
4. Bangunan	6,81	5,39	5,28
5. Perdagangan, Hotel & Restoran	36,14	28,97	28,35
6. Pengangkutan & Komunikasi	9,36	7,64	7,55
7. Perbankan & Lembaga Keuangan lainnya	11,17	26,76	26,83
8. Sewa Rumah	4,46	3,39	3,24
9. Pemerintahan & Pertahanan	6,44	5,15	5,63
10. Jasa - Jasa	7,59	6,41	6,48
J U M L A H	100,00	100,00	100,00

TABEL 3. (LANJUTAN)

L A P A N G A N U S A H A	1986	1987	1988
1. P e r t a n i a n	3,04	2,84	2,92
2. Industri Pengolahan	12,72	13,31	15,82
3. Listrik, Gas & Air Mimum	3,98	3,41	3,84
4. B a n g u n a n	5,89	5,79	6,35
5. Perdagangan, Hotel & Restoran	31,61	29,81	31,68
6. Pengangkutan & Komunikasi	8,85	9,21	9,23
7. Perbankan & Lembaga Keuangan lainnya	16,54	19,69	14,03
8. S e w a R u m a h	3,69	3,18	3,23
9. Pemerintahan & Pertahanan	6,54	5,62	5,29
10. J a s a - J a s a	7,14	7,14	7,61
J U M L A H	100,00	100,00	100,00

TABEL 4. DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO WILAYAH
 JAKARTA BARAT ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1983, MENURUT LAPANGAN
 USAHA, 1983-1988 (%)

LAPANGAN USAHA	1983	1984	1985
1. Pertanian	3,79	2,86	2,40
2. Industri Pengolahan	10,34	10,03	10,67
3. Listrik, Gas & Air Mimum	3,90	2,74	3,45
4. Bangunan	6,81	5,18	5,56
5. Perdagangan, Hotel & Restoran	36,14	27,61	28,01
6. Pengangkutan & Komunikasi	9,36	7,39	7,27
7. Perbankan & Lembaga Keuangan lainnya	11,17	30,03	27,87
8. Sewa Rumah	4,46	3,51	3,57
9. Pemerintahan & Pertahanan	6,44	4,93	5,13
10. Jasa - Jasa	7,59	5,72	6,07
J U M L A H	100,00	100,00	100,00

TABEL 4. (LANJUTAN)

L A P A N G A N U S A H A	1986	1987	1988
1. P e r t a n i a n	3,00	3,00	2,81
2. Industri Pengolahan	12,84	12,79	14,86
3. Listrik, Gas & Air Mimum	3,89	3,65	4,44
4. B a n g u n a n	6,15	5,93	6,35
5. Perdagangan, Hotel & Restoran	30,91	29,97	31,85
6. Pengangkutan & Komunikasi	8,83	9,42	9,26
7. Perbankan & Lembaga Keuangan lainnya	17,68	18,82	13,62
8. S e w a R u m a h	3,99	3,92	3,98
9. Pemerintahan & Pertahanan	5,80	5,54	5,48
10. J a s a - J a s a	6,91	6,96	7,35
J U M L A H	100,00	100,00	100,00

TABEL 5. INDEKS PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO WILAYAH
 JAKARTA BARAT ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA,
 1983-1988 (1983=100,00)

LAPANGAN USAHA	1983	1984	1985
1. Pertanian	100,00	107,07	95,22
2. Industri Pengolahan	100,00	138,09	167,60
3. Listrik, Gas & Air Mimum	100,00	122,48	141,33
4. Bangunan	100,00	112,34	123,21
5. Perdagangan, Hotel & Restoran	100,00	113,64	124,73
6. Pengangkutan & Komunikasi	100,00	115,79	128,26
7. Perbankan & Lembaga Keuangan lainnya	100,00	339,70	381,71
8. Sewa Rumah	100,00	108,02	115,73
9. Pemerintahan & Pertahanan	100,00	113,32	138,94
10. Jasa - Jasa	100,00	119,78	135,76
J U M L A H	100,00	141,83	158,98

TABEL 5. (LANJUTAN)

LAPANGAN USAHA	1986	1987	1988
1. Pertanian	125,11	137,49	156,74
2. Industri Pengolahan	191,59	236,33	311,10
3. Listrik, Gas & Air Mimum	159,01	160,58	200,27
4. Bangunan	134,73	156,12	189,59
5. Perdagangan, Hotel & Restoran	136,18	151,31	178,18
6. Pengangkutan & Komunikasi	147,24	180,61	200,53
7. Perbankan & Lembaga Keuangan lainnya	230,60	323,43	255,37
8. Sewa Rumah	128,91	130,98	147,22
9. Pemerintahan & Pertahanan	158,11	160,11	167,15
10. Jasa - Jasa	146,70	172,75	203,99
J U M L A H	155,75	183,52	203,33

TABEL 6. INDEKS PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO WILAYAH
 JAKARTA BARAT ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1983,
 MENURUT LAPANGAN USAHA, 1983-1988, (1983=100,00)

LAPANGAN USAHA	1983	1984	1985
1. Pertanian	100,00	82,83	83,93
2. Industri Pengolahan	100,00	106,55	136,49
3. Listrik, Gas & Air Minum	100,00	77,15	117,16
4. Bangunan	100,00	83,60	107,96
5. Perdagangan, Hotel & Restoran	100,00	83,84	102,44
6. Pengangkutan & Komunikasi	100,00	86,63	102,71
7. Perbankan & Lembaga Keuangan lainnya	100,00	295,02	329,97
8. Sewa Rumah	100,00	86,58	106,03
9. Pemerintahan & Pertahanan	100,00	83,99	105,43
10. Jasa - Jasa	100,00	82,74	105,82
J U M L A H	100,00	109,78	132,27

TABEL 6. (LANJUTAN)

LAPANGAN USAHA	1986	1987	1988
1. Pertanian	99,35	107,20	102,90
2. Industri Pengolahan	155,99	167,26	199,43
3. Listrik, Gas & Air Mimum	125,27	126,64	157,87
4. Bangunan	113,47	117,84	129,41
5. Perdagangan, Hotel & Restoran	107,40	112,07	122,31
6. Pengangkutan & Komunikasi	118,40	136,08	137,18
7. Perbankan & Lembaga Keuangan lainnya	198,77	227,75	169,10
8. Sewa Rumah	112,44	119,02	124,01
9. Pemerintahan & Pertahanan	113,14	116,41	117,99
10. Jasa - Jasa	114,35	124,06	134,35
J U M L A H	125,59	135,22	138,74

TABEL 7. INDEKS BERANTAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO WILAYAH
 JAKARTA BARAT, ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN
 USAHA, 1983-1988, (TAHUN SEBELUMNYA=100,00)

LAPANGAN USAHA	1983	1984	1985
1. Pertanian	-	107,07	88,93
2. Industri Pengolahan	-	138,09	121,38
3. Listrik, Gas & Air Mimum	-	122,48	115,39
4. Bangunan	-	112,34	109,68
5. Perdagangan, Hotel & Restoran	-	113,64	109,76
6. Pengangkutan & Komunikasi	-	115,79	110,76
7. Perbankan & Lembaga Keuangan lainnya	-	339,70	112,36
8. Sewa Rumah	-	108,02	107,13
9. Pemerintahan & Pertahanan	-	113,32	122,62
10. Jasa - Jasa	-	119,78	113,34
J U M L A H	-	141,83	112,09

TABEL 7. (LANJUTAN)

LAPANGAN USAHA	1986	1987	1988
1. Pertanian	131,39	109,89	114,00
2. Industri Pengolahan	114,31	123,35	131,64
3. Listrik, Gas & Air Mimum	112,50	100,99	124,72
4. Bangunan	109,35	115,88	121,43
5. Perdagangan, Hotel & Restoran	109,18	111,10	117,76
6. Pengangkutan & Komunikasi	114,80	122,66	111,03
7. Perbankan & Lembaga Keuangan lainnya	60,41	140,26	78,96
8. Sewa Rumah	111,40	101,61	112,40
9. Pemerintahan & Pertahanan	113,80	101,27	104,39
10. Jasa - Jasa	108,05	117,76	118,08
J U M L A H	97,97	117,83	110,79

TABEL 8. INDEKS BERANTAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO WILAYAH
 JAKARTA BARAT, ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1983 MENURUT
 LAPANGAN USAHA, 1983-1988, (TAHUN SEBELUMNYA=100,00)

LAPANGAN USAHA	1983	1984	1985
1. Pertanian	-	82,83	101,33
2. Industri Pengolahan	-	106,55	128,10
3. Listrik, Gas & Air Mimum	-	77,15	151,86
4. Bangunan	-	83,60	129,13
5. Perdagangan, Hotel & Restoran	-	83,84	122,19
6. Pengangkutan & Komunikasi	-	86,63	118,57
7. Perbankan & Lembaga Keuangan lainnya	-	295,02	111,85
8. Sewa Rumah	-	86,58	122,47
9. Pemerintahan & Pertahanan	-	83,99	125,53
10. Jasa - Jasa	-	82,74	127,89
J U M L A H	-	109,78	120,49

TABEL 8. (LANJUTAN)

LAPANGAN USAHA	1986	1987	1988
1. Pertanian	118,37	107,90	95,98
2. Industri Pengolahan	114,29	107,22	119,23
3. Listrik, Gas & Air Mimum	106,92	101,09	124,66
4. Bangunan	105,11	103,85	109,82
5. Perdagangan, Hotel & Restoran	104,83	104,36	109,13
6. Pengangkutan & Komunikasi	115,27	114,93	100,81
7. Perbankan & Lembaga Keuangan lainnya	60,24	114,58	74,25
8. Sewa Rumah	106,05	105,85	104,19
9. Pemerintahan & Pertahanan	107,31	102,89	101,35
10. Jasa - Jasa	108,07	108,49	108,30
J U M L A H	94,95	107,67	102,60

TABEL 9. INDEKS IMPLISIT PRODUK DOMNESTIK REGIONAL BRUTO WILAYAH
 JAKARTA BARAT MENURUT LAPANGAN USAHA, 1983-1988,
 (1983=100,00)

LAPANGAN USAHA	1983	1984	1985
1. Pertanian	100,00	129,27	113,45
2. Industri Pengolahan	100,00	129,59	122,79
3. Listrik, Gas & Air Mimum	100,00	158,75	120,63
4. Bangunan	100,00	134,38	114,13
5. Perdagangan, Hotel & Restoran	100,00	135,55	121,76
6. Pengangkutan & Komunikasi	100,00	133,67	124,87
7. Perbankan & Lembaga Keuangan lainnya	100,00	115,14	115,68
8. Sewa Rumah	100,00	124,77	109,15
9. Pemerintahan & Pertahanan	100,00	134,91	131,78
10. Jasa - Jasa	100,00	144,76	128,30
J U M L A H	100,00	129,20	120,20

TABEL 9. (LANJUTAN)

L A P A N G A N U S A H A	1986	1987	1988
1. P e r t a n i a n	125,93	128,25	152,33
2. Industri Pengolahan	122,82	141,30	156,00
3. Listrik, Gas & Air Mimum	126,93	126,80	126,86
4. B a n g u n a n	118,74	132,49	146,50
5. Perdagangan, Hotel & Restoran	126,80	135,01	145,69
6. Pengangkutan & Komunikasi	124,36	132,72	146,18
7. Perbankan & Lembaga Keuangan lainnya	116,01	142,01	151,02
8. S e w a R u m a h	114,65	110,06	118,72
9. Pemerintahan & Pertahanan	139,74	137,54	141,66
10. J a s a - J a s a	128,28	139,25	151,83
J U M L A H	124,02	135,72	146,55

TABEL 10. KONTRIBUSI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO WILAYAH JAKARTA BARAT ATAS DASAR HARGA BERLAKU, MENURUT LAPANGAN USAHA, 1983-1988 (%)

LAPANGAN USAHA	1983	1984	1985
1. Pertanian	38,72	41,62	35,30
2. Industri Pengolahan	9,59	11,67	11,16
3. Listrik, Gas & Air Mimum	17,91	17,42	16,78
4. Bangunan	12,24	12,31	12,41
5. Perdagangan, Hotel & Restoran	22,66	22,68	22,65
6. Pengangkutan & Komunikasi	12,59	12,80	13,76
7. Perbankan & Lembaga Keuangan lainnya	12,40	23,79	28,68
8. Sewa Rumah	18,62	18,79	18,77
9. Pemerintahan & Pertahanan	17,07	17,23	17,41
10. Jasa - Jasa	15,22	15,13	15,03
J U M L A H	15,86	18,30	18,74

TABEL 10. (LANJUTAN)

LAPANGAN USAHA	1986	1987	1988
1. Pertanian	33,09	32,46	32,29
2. Industri Pengolahan	11,02	11,02	11,02
3. Listrik, Gas & Air Mimum	16,70	16,69	16,66
4. Bangunan	12,38	12,38	12,38
5. Perdagangan, Hotel & Restoran	22,54	22,50	22,52
6. Pengangkutan & Komunikasi	13,57	13,24	13,17
7. Perbankan & Lembaga Keuangan lainnya	16,26	18,38	14,37
8. Sewa Rumah	18,66	18,66	18,66
9. Pemerintahan & Pertahanan	17,33	17,33	17,33
10. Jasa - Jasa	15,07	14,91	14,77
J U M L A H	16,45	16,58	15,76

TABEL 11. KONTRIBUSI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO WILAYAH JAKARTA BARAT ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1983, MENURUT LAPANGAN USAHA, 1983-1988 (%)

LAPANGAN USAHA	1983	1984	1985
1. Pertanian	38,72	32,97	31,53
2. Industri Pengolahan	9,59	9,73	10,41
3. Listrik, Gas & Air Mimum	17,91	14,21	16,22
4. Bangunan	12,24	9,85	12,23
5. Perdagangan, Hotel & Restoran	22,66	18,85	21,87
6. Pengangkutan & Komunikasi	12,59	10,33	13,01
7. Perbankan & Lembaga Keuangan lainnya	12,40	23,27	28,61
8. Sewa Rumah	18,62	15,51	18,28
9. Pemerintahan & Pertahanan	17,07	13,98	16,80
10. Jasa - Jasa	15,22	12,29	14,72
J U M L A H	15,86	15,74	18,20

TABEL 11. (LANJUTAN)

LAPANGAN USAHA	1986	1987	1988
1. Pertanian	37,08	36,00	33,76
2. Industri Pengolahan	11,02	11,02	11,02
3. Listrik, Gas & Air Mimum	16,57	16,54	16,41
4. Bangunan	12,38	12,38	12,38
5. Perdagangan, Hotel & Restoran	22,52	22,51	22,54
6. Pengangkutan & Komunikasi	14,11	14,06	13,39
7. Perbankan & Lembaga Keuangan lainnya	16,26	18,38	14,37
8. Sewa Rumah	18,66	18,66	18,66
9. Pemerintahan & Pertahanan	17,35	17,35	17,35
10. Jasa - Jasa	15,25	15,07	14,97
J U M L A H	16,49	16,78	15,91

TABEL 12. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO WILAYAH JAKARTA BARAT
DAN ANGKA-ANGKA PER KAPITA, TAHUN 1983-1988

No.	U R A I A N	1 9 8 3	1 9 8 4	1 9 8 5
1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Jutaan Rupiah)	1.240.096	1.758.803	1.971.527
2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1983 (Jutaan Rupiah)	1.240.096	1.361.335	1.640.230
3.	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)	1.445.930	1.525.534	1.609.519
4.	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rupiah)	857.646	1.152.910	1.224.917
5.	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 1983 (Rupiah)	857.646	892.366	1.019.081
6.	Indeks Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (1983 = 100,00)	100,00	134,43	142,82
7.	Indeks Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 1983 (1983 = 100,00)	100,00	104,05	118,82

TABEL 12. (LANJUTAN)

No.	U R A I A N	1 9 8 6	1 9 8 7	1 9 8 8
1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Jutaan Rupiah)	1.931.477	2.275.876	2.521.510
2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1983 (Jutaan Rupiah)	1.557.409	1.676.908	1.720.566
3.	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)	1.668.219	1.726.076	1.786.223
4.	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rupiah)	1.157.808	1.318.526	1.411.643
5.	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 1983 (Rupiah)	933.576	971.515	963.243
6.	Indeks Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (1983 = 100,00)	135,00	153,74	164,60
7.	Indeks Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 1983 (1983 = 100,00)	108,85	113,28	112,31

Lampiran 1.

ILUSTRASI PENGERTIAN OUTPUT
DAN NILAI TAMBAH

Sektor	Output	Biaya antara	Nilai tambah
1. Pupuk	100	-	100
2. Kapas	400	100	300
3. Benang pital	700	400	300
4. Tekstil	1100	700	400
5. Konveksi	1600	1100	500
	3900	2300	1600

<https://jakbarkota.bps.go.id>

Lampiran 2

SKEMA PENGERTIAN PDB/PDRB

OUTPUT

BIAYA ANTARA (-)

NILAI TAMBAH BRUTO PERTANIAN
 NILAI TAMBAH BRUTO PERTAMBANGAN
 :
 :

NILAI TAMBAH BRUTO JASA-JASA

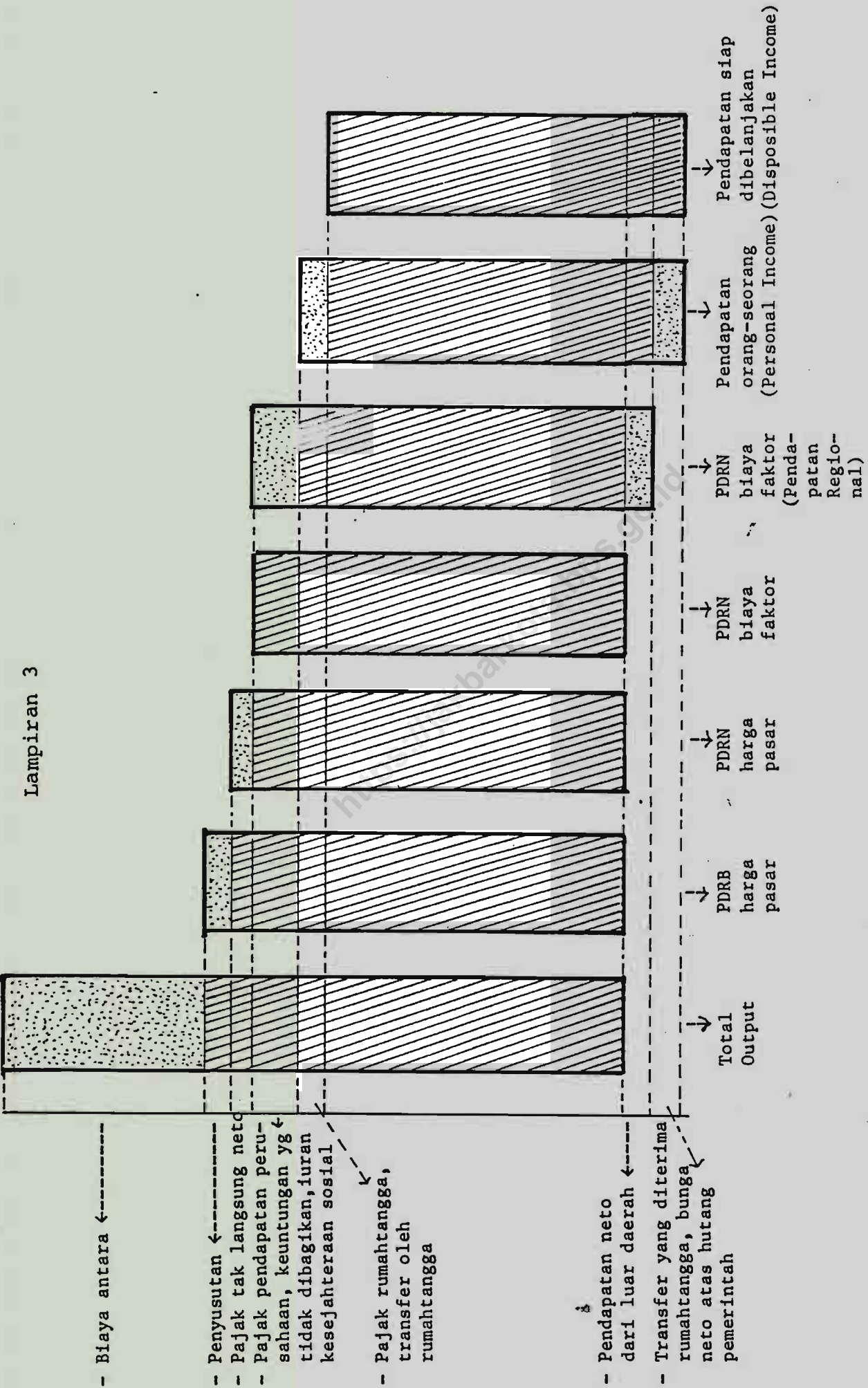
BALAS JASA →
 FAKTOR →
 PRODUKSI →
 UPAH DAN GAJI →
 SURPLUS USAHA →
 PENYUSUTAN →
 PAJAK TAK LANGSUNG
 NETO →

PRODUK DOMESTIK BRUTO (V)

KONSUMSI RUMAHTANGGA (C_N)
 KONSUMSI PEMERINTAH (C_G)
 PEMBENTUKAN MODAL TETAP (I)
 PERUBAHAN STOK (ΔS)
 NET EKSPOR (X - M)

$$Y = C_N + C_G + I + \Delta S + (X - M)$$

Lampiran 3



Lampiran 4

RINGKASAN PENGHITUNGAN PENDAPATAN REGIONAL

1. Produk domestik regional bruto atas dasar harga pasar = nilai produksi - biaya antara.
2. Produk domestik regional neto atas dasar harga pasar = produk domestik regional bruto - penyusutan.
3. Produk domestik regional neto atas dasar biaya faktor = produk domestik regional neto atas dasar harga pasar - pajak tidak langsung neto.
4. Pendapatan regional = produk domestik regional neto atas dasar biaya faktor + pendapatan neto dari luar wilayah.
5. Pendapatan orang-seorang = pendapatan regional - pajak pendapatan perusahaan - keuntungan yang tidak dibagikan - iuran kesejahteraan sosial + transfer yang diterima rumahtangga, dan bunga neto atas hutang pemerintah.
6. Pendapatan yang siap dibelanjakan (disposable income) = pendapatan orang seorang - transfer yang dibayarkan rumahtangga - pajak rumahtangga.

Lampiran 5

METODE PENGHITUNGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
SEKTOR: INDUSTRI PENGOLAHAN
KEGIATAN: INDUSTRI BARANG DARI KULIT

No.	Biaya/input	Jutaan Rp.	No.	Produksi/Output	Jutaan Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	BIAYA ANTARA	27 264			
	1. Pemakaian bahan kulit	12 500		PRODUKSI	
	2. Pemakaian bahan bakar	2 203			
	3. Bahan-bahan untuk perbaikan dan pemeliharaan	4 090	1.	Sepatu	18 500
	4. Bahan-bahan keperluan industri, kantor/administrasi & lainnya	64	2.	Tas kulit	12 700
	5. Jasa industri yang diberikan pihak lain	2 523	3.	Produk lainnya	3 713
	6. Ongkos perbaikan dan pemeliharaan prasarana produksi	3 036	4.	Listrik yang dijual	16
	7. Sewa gedung, mesin dan alat-alat	97	5.	Penyewaan mesin dan alat-alat	974
	8. Jasa lainnya	2 625			
	9. Hadiah sumbangan	126			
II.	BIAYA PRIMER	8 639			
	10. Upah dan gaji	3 409			
	11. Pajak tidak langsung	329			
	12. Penyusutan 2,3% dari nilai produksi	826			
	13. Keuntungan	4 075			
	TOTAL BIAYA/INPUT	35 903		TOTAL PRODUKSI/OUTPUT	35 903

a. Pendekatan produksi: nilai tambah bruto = total produksi - biaya antara
= 35 903 - 27 264 = 18 639

b. Pendekatan pendapatan: nilai tambah bruto = gaji & upah + sewa tanah + bunga modal + keuntungan + penyusutan + pajak tak langsung
= 3 409 + 4 075 + 826 + 329 = 8 639

Lampiran 6

CONTOH PENGHITUNGAN NILAI TAMBAH BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN

1. Revaluasi:

a. Produksi: P_0 = harga pada tahun dasar

Q_0 = banyaknya produksi pada tahun dasar

Q_1 = banyaknya produksi pada tahun yang berjalan

P_0Q_1 = nilai produksi untuk tahun yang berjalan atas dasar harga konstan

b. Biaya produksi:

P'_0 = harga tahun dasar

Q'_1 = banyaknya bahan yang dipakai untuk produksi pada tahun yang berjalan

$P_0Q_1 - P'_0Q'_1$ = Nilai dari biaya produksi untuk tahun yang berjalan atas dasar harga konstan

c. Nilai tambah (value added) atas dasar harga konstan = $P_0Q_1 - P'_0Q'_1$

2. Ekstrapolasi:

	1983	1984	1985
Nilai tambah atas dasar harga yang berlaku	2 000	2 200	2 400
Indeks produksi	100	105	107
Nilai tambah atas dasar harga konstan 1983	2 000	$\frac{2000}{100} \times 105$ = 2.100	$\frac{2000}{100} \times 107$ = 2 140

3. Deflasi:

	1983	1984	1985
Nilai tambah atas dasar harga yang berlaku	2 000	2 200	2 500
Indeks HPB	100	105	107
Nilai tambah atas dasar harga konstan 1983	2 000	$\frac{2200}{105} \times 100$ = 2 095	$\frac{2500}{107} \times 100$ = 2 336

Lampiran 6 (Lanjutan)

4. Deflasi berganda:

	1983	1984	1985
1. Nilai produksi atas dasar harga yang berlaku	4 000	4 800	5 400
2. Indeks harga produksi	100	108	112
3. Nilai produksi atas dasar harga konstan tahun 1983	4 000	$\frac{4\,800}{108} \times 100$ = 4 444	$\frac{5\,400}{112} \times 100$ = 4 821
4. Nilai biaya antara atas dasar harga yang berlaku	1 800	2 200	2 500
5. Indeks harga biaya antara	100	107	110
6. Nilai biaya antara atas dasar harga konstan tahun 1983	1 800	$\frac{2\,200}{107} \times 100$ = 2 056	$\frac{2\,500}{110} \times 100$ = 2 273
7. Nilai tambah atas dasar harga konstan tahun 1983 = 3. - 6.	2 200	2 388	2 548

<https://jakbarkota.bps.go.id>



KANTOR STATISTIK PROPINSI DKI JAKARTA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8 – 9
Telp. 340084 JAKARTA.

